

SKRIPSI

**STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA SEKSUAL ANTARA UU No.
12 TAHUN 2022 (UU TPKS) DENGAN UU No. 1 TAHUN 2023 (KUHP)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA SEKSUAL ANTARA UU No. 12
TAHUN 2022 (UU TPKS) DENGAN UU No. 1 TAHUN 2023 (KUHP)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan oleh:

PUTU YANUAR KURNIAWAN

NIM : 18.C1.0059

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum

NPP: 05811986018

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2023

ABSTRAK

Tindak pidana seksual merupakan salah satu delik yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Isu tentang tindak pidana seksual kembali gencar dibicarakan sejak adanya RUU PKS dimana rancangan undang-undang tersebut dinilai sangat dibutuhkan dan harus segera diundangkan. Seiring berjalannya waktu, pihak yang berwenang akhirnya mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Seksual sebagai aturan hukum terhadap tindak pidana seksual yaitu kekerasan seksual. UU TPKS mulai menjadi perhatian tatkala DPR merumuskan dan mengundang UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP karena delik yang diangkat didalam KUHP Nasional memiliki kemiripan dengan rumusan delik dalam UU TPKS. Langkah untuk membandingkan antara kedua aturan tersebut cukup diperlukan untuk mengetahui isi rumusan dan sanksi pidana anatara keduanya serta menghindari tumpang-tindih atau *overlapping* dikemudian hari.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan bertemu langsung dengan narasumber penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi kepustakaan dengan metode analisis datanya yaitu metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan kemiripan dalam rumusan tindak pidana seksual dalam UU TPKS dan KUHP Nasional. Kemiripan rumusan tersebut yaitu berupa pengambilan beberapa unsur delik dalam UU TPKS yang direformulasi dan diperluas rumusannya dalam KUHP. Pidanaan apabila terjadi tindak pidana seksual ketika KUHP ini mulai berlaku yaitu dengan menilai orientasi tindakannya serta menilai dalam pemenuhan unsur pidananya. Keduanya menggunakan pemidaan yang sama yaitu penjara dan denda, namun dalam hal pemidanaan, KUHP lebih ringan dibandingkan dengan UU TPKS.

Kesimpulannya adalah keduanya sama-sama mengatur delik tindak pidana seksual berupa kekerasan seksual namun dengan rumusan yang berbeda yaitu adanya perluasan rumusan pada KUHP Nasional dan dalam penerapan sanksi, eksekusi berdasarkan pada putusan pengadilan namun dalam KUHP sanksi pidana penjara ataupun denda dapat diganti dengan bentuk pemidanaan lain sesuai dalam KUHP. Kedua hal tersebut dapat berjalan dengan baik jika adanya kepastian hukum dalam suatu aturan dan penegak hukum yang berintegritas dalam menjalankan putusan pengadilan.

Kata kunci: UU TPKS, UU KUHP, Kekerasan Seksual.